



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSRAL TAHIR
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 508098

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.784.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.805.000.000
2. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 29.54 m2/29.54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 27.33 m2/27.33 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 599.600.000
7. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 704.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, VESPA PIAGIO GTS 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 542.000.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA S Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.



40.000.000

5. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

66.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 17.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 865.393.658

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.370.993.658

III. HUTANG

Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.070.993.658

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.